



Efektivitas Pemerintahan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Kumuh Kelurahan Meranti Pandak) Kota Pekanbaru

Meiyuza Wulandari^{1*}, Sujianto²

¹⁻²Public Administration, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: meiyuza.wulandari2167@student.unri.ac.id¹, sujianto@lecturer.unri.ac.id²

*Korespondensi penulis: meiyuza.wulandari2167@student.unri.ac.id

Abstract. *Slum areas in Pekanbaru City are being addressed by the local government, including the Meranti Pandak Sub-district. This study aims to assess the effectiveness of the Meranti Pandak Sub-district government in maintaining environmental cleanliness in slum areas and to identify the inhibiting factors affecting its effectiveness (Case Study: Slum Area in Meranti Pandak Sub-district, Pekanbaru City). Environmental issues in this area are of major concern due to their impact on public health and quality of life. The study applies Duncan's theory (as cited in Nurmalasari & Supriyadi, 2021), which highlights three indicators: goal achievement, integration, and adaptation. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the sub-district government's efforts have not been fully effective. This is evident from poorly targeted programs, unequal service distribution among residents, low community participation, and weak monitoring and evaluation by the local authorities. Additional obstacles include unresolved waste management issues, limited budget, and non-permanent building structures. To improve effectiveness, the study recommends more focused program planning, sustainable community empowerment, and enhanced cross-sectoral coordination.*

Keywords: *Effectiveness, Environmental Cleanliness, Slum Area, Sub-District Government.*

Abstrak. Kawasan kumuh di Kota Pekanbaru akan di tangani oleh Pemerintahan daerah Kota Pekanbaru. Salah satunya Kelurahan Meranti Pandak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Pemerintahan Kelurahan Meranti Pandak dalam menyelenggarakan kebersihan lingkungan di kawasan kumuh dan mengetahui faktor penghambat Efektivitas Pemerintahan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Kumuh Kelurahan Meranti Pandak) Kota Pekanbaru. Permasalahan lingkungan di wilayah ini menjadi perhatian utama karena berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Duncan dalam Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I, (2021) yang mengemukakan 3 indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari sasaran program yang tidak tepat sasaran dan kurang merata antar warga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pihak kelurahan. Faktor-faktor penghambat lainnya adalah permasalahan sampah yang tidak terselesaikan, keterbatasan anggaran, dan bangunan yang tidak jangka panjang. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perencanaan program yang lebih terarah, pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Efektivitas, Kawasan Kumuh, Kebersihan Lingkungan, Pemerintahan Kelurahan.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki beragam kewenangan yang mencakup sektor-sektor vital dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pendidikan, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan fasilitas pendidikan, serta mengatur kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Di bidang kesehatan, mereka berperan dalam penyediaan layanan kesehatan dasar, pengawasan fasilitas kesehatan, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru juga memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur, mengelola perizinan usaha, mempromosikan sektor pariwisata, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Pemerintah Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengatur pengelolaan limbah, serta melakukan upaya-upaya pelestarian alam dan sumber daya alam yang ada di wilayah kota. Namun, pada kenyataannya di Kota Pekanbaru masih terdapat beberapa kawasan kumuh. Hal ini, terdapat di dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

Kelurahan merupakan salah satu perangkat pemerintahan di daerah. Kelurahan yang sebelumnya bergerak bebas dalam paradigma otonomi bergeser keanekaragamannya menjadi keseragaman dalam kesatuan pemerintahan kecamatan. Kelurahan tidak lagi memiliki otonomi dalam mengelola kewilayahan termasuk peraturan mengenai kelurahan yang dibuat dilingkungan wilayah kerjanya. Lurah sebagai kepala kewilayahan tidak lagi memiliki kewenangan otonom terhadap wilayah kerjanya melainkan menerima tugas dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang dilimpahkan oleh Camat sebagai pengendali wilayah otonom Kelurahan.

Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa Kelurahan bukan penanggung jawab administratif dalam pengertian Lurah mendapatkan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab terhadap Bupati/Walikota, namun Lurah melaksanakan tugas umum Pemerintahan di wilayah Kelurahan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, pembinaan dan lain sebagainya diisyaratkan melakukan koordinasi kepada Camat sebagai penanggung jawab sektor wilayah dari kecamatan. Koordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan

yang dimiliki lurah ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan hasil riset dengan pihak kelurahan, Lurah menyatakan bahwa tanggung jawab pemeliharaan kebersihan lingkungan merupakan bagian integral dari tugas administratif kelurahan di wilayahnya, yang dilakukan secara bersama-sama dengan unit Rt/Rw. Bagian yang bertanggung jawab langsung dalam menangani kebersihan lingkungan di kelurahan tersebut adalah seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban (Pemkettib). Posisi Kelurahan tidak lagi terlihat sebagai Perangkat Daerah, tugas, fungsi serta kewenangan Lurah diberikan oleh Kecamatan sebagai perangkat daerah terendah di pemerintahan. Camat dan Lurah memiliki wewenang penuh dan otonom dalam penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Jadi, pada masa itu secara hukum posisi Camat dan Lurah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas Daerah.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 13.698 Jiwa, Kelurahan Meranti Pandak mengalami pertumbuhan pembangunan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan banyaknya bangunan atau permukiman di Kelurahan Meranti Pandak. Namun, bangunan atau permukiman ini tidak sepenuhnya layak huni, sehingga menjadi salah satu masalah pembangunan yang biasa dikenal sebagai kawasan kumuh. Pada pasal 8 kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Hasil observasi menunjukkan beberapa kondisi lingkungan di Kelurahan Meranti Pandak.

Kondisi kawasan kumuh di Kelurahan Meranti Pandak, berdasarkan tujuh indikator yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan di wilayah tersebut tidak layak huni, dengan mayoritas rumah berbahan kayu. Infrastruktur jalan di kawasan ini tergolong sempit, hanya dapat dilalui oleh satu unit sepeda motor. Dalam aspek penyediaan air minum, sebagian masyarakat masih mengandalkan air galon isi ulang. Sistem drainase lingkungan mengalami penyumbatan akibat akumulasi sampah serta memiliki ukuran yang relatif kecil, sehingga kurang efektif dalam mengalirkan air. Pengelolaan air limbah di beberapa RT/RW telah memiliki sistem pembuangan dan sarana mandi, cuci, kakus (MCK), namun belum merata di seluruh wilayah. Permasalahan dalam pengelolaan sampah masih terjadi, sementara sistem proteksi kebakaran tidak ditemukan di kawasan ini, yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

Kawasan kumuh dapat diartikan sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi di suatu kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.

Permukiman kumuh dapat ditemukan di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya diasosiasikan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kawasan permukiman kumuh juga menjadi sumber masalah sosial seperti kriminalitas, narkoba, dan miras. Di banyak negara miskin, permukiman kumuh juga menjadi pusat masalah karena kondisinya yang tidak higienis. Daerah kumuh merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Penjelasan tugas dan fungsi kelurahan pada Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang dijadikan peneliti sebagai objek dari penelitian ini adalah salah satu fungsi dari Lurah adalah “Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum”. Pemeliharaan Infrastruktur: Lurah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur di kelurahan, seperti jalan, trotoar, saluran drainase, taman, dan lain-lain, tetap terjaga dengan baik. Ini melibatkan pemantauan kondisi infrastruktur, perencanaan perawatan rutin, dan penanganan cepat terhadap kerusakan atau masalah yang muncul.

Permukiman kumuh di Meranti Pandak disebabkan karena mulai berkembangnya kawasan tersebut akibat proses pengembangan wilayah perkotaan yang semakin padat penduduk dan bangunannya. Sebagian besar masyarakat terpaksa menghuni kawasan di pinggiran kota ini. Menurut Hadi, Bedasari dan Zebua (2025) Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ini berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan akan perumahan. Apabila kebutuhan ini tidak diimbangi dengan pembangunan perumahan yang layak huni, maka keterbatasan lahan berpotensi menciptakan permukiman dan perumahan kumuh baru. Kualitas bangunan yang sebagian masih buruk menjadi faktor penyebab kawasan ini masuk kategori permukiman kumuh. Meningkatnya kepadatan bangunan merupakan faktor pendukung lainnya sehingga adanya kompetisi pemanfaatan ruang mulai tampak.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pasal 1 Perda ini menyatakan bahwa “permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi lokal untuk mengatasi masalah ini, termasuk program-program peningkatan infrastruktur dan pelatihan keterampilan untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan untuk merubah wajah kelurahan ini menjadi tempat yang layak huni dan memberikan kesejahteraan bagi penduduknya.

Permasalahan sampah di Kelurahan Meranti Pandak juga menjadi masalah utama dalam penanganan kawasan kumuh ini. Dulu Kelurahan Meranti Pandak telah mengimplementasikan program kebersihan lingkungan yang dikenal sebagai Swakelola, sebagai bagian dari upaya mitigasi masalah lingkungan yang dihadapi. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kelurahan Meranti Pandak dan Dinas Lingkungan Hidup serta Kebersihan Kota Pekanbaru. Sistem Swakelola melibatkan kontribusi finansial bulanan dari masyarakat setempat untuk pendanaan pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). Meskipun demikian, program ini menghadapi kendala signifikan, yaitu proses pengambilan sampah oleh pihak terkait sangat minim dilakukan akibatnya terjadi penumpukan sampah yang signifikan dan mengurangi efektivitas program kebersihan tersebut. Beberapa warga setempat sangat mengeluhkan keadaan ini, bahkan warga setempat memilih membakar sampah mereka dibandingkan harus menumpuk sampah yang menyebabkan masalah lingkungan dan merusak penciuman.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaraannya. Penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian yang umum mengenai efektivitas organisasi. Kata kunci pengertian ini ialah kata efektif karena pada akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas itu. Bagi sejumlah sarjana sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. Singkatnya, pengertian efektivitas organisasi mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Kami kemukakan disini bahwa bahwa ancangan yang lebih produktif pada studi efektivitas organisasi adalah kesediaan menyadari adanya perbedaan dalam organisasi dan usaha menghadapinya dalam bentuk model-model kemungkinan (yang mungkin ada) dari organisasi (Richard M. Steers, 1985).

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Kurniawan dalam (Silvia & Sujianto, 2021) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Makmur dalam (Silvia & Sujianto, 2021) mengungkapkan efektivitas

berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai, apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah itu adalah *person* yang menduduki jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Sebagai contoh Pemerintah Sby, Pemerintah Jokowi. Sedangkan Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjuk pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik (Labolo. M, 2014).

Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia telah banyak peraturan yang dikeluarkan mengenai pemerintahan daerah. Struktur pemimpin di Indonesia mempunyai lima perangkat yaitu: Kepala Negara yang disebut Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, karena jabatannya adalah termasuk jabatan Pemerintah Pusat. Jabatan dibawah Bupati/Walikota adalah Camat dan Ketua Desa/Lurah. Camat dan ketua Desa/Lurah, karena jabatannya adalah jabatan Pemerintah Daerah atau Pemerintah lokal. Pemerintah lokal menurut struktur pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari Ketua Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam struktur Lembaga Pemerintahan Lokal terdapat juga lembaga-lembaga sosial yang mempunyai fungsi untuk membantu menjalankan pengurusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lokal/desa (Sujianto, 2010).

Konsep Kelurahan

Pengertian kelurahan dalam PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan tersebut adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Definisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daldjoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa (Sarkawi, 2022).

Pengertian kelurahan dalam PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan tersebut adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan

kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Definisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daldjoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa (Sarkawi, 2022).

Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, muntaber dan lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih indah dan nyaman (Slamet, 1994). Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian (Risnawati, R., & Handayani, S. R, 2021).

Menurut Lastriyah (2011:83) “Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Kebersihan merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari”. Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran dan penyakit, yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat, dimana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntaber dan lainnya. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih indah dan nyaman. Dalam agama Islam juga diajarkan mengenai kebersihan lingkungan mencakup kebersihan makan, kebersihan minum, kebersihan rumah, kebersihan sumber air, pekarangan dan jalan (Jumarsa, J., Rizal, M., & Jailani, J, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang bersifat deskriptif. Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Pada penelitian ini, peneliti memilih Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru untuk menjadi lokasi penelitian ini, karena dari fenomena atau masalah yang terjadi dan yang tertuang di dalam latar belakang maka, peneliti tertarik untuk membahas Kelurahan Meranti Pandak sebagai lokasi penelitian ini. Peneliti juga akan melakukan penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berlokasi di Jl. Abdul Rahman Hamid, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Wilayah Perkantoran Walikota Pekanbaru.

Pada penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah *Staff* Bidang Kawasan Permukiman Bagian Analis Batas Wilayah & Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, Bapak Hadyan Maulana Andinata, S. PWK & Ibu Mairiza, ST; Lurah Meranti Pandak, Bapak Silvenus Hendra, SH; RT/ RW Kelurahan Meranti Pandak; dan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak. Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan topik yang diambil peneliti. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemerintahan Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Kumuh Kelurahan Meranti Pandak) Kota Pekanbaru

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan yang baik. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu sasaran/target dan kurun waktu. Indikator pencapaian tujuan dalam penelitian ini menjelaskan upaya Pemerintahan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan di Kawasan kumuh Kelurahan Meranti Pandak apakah pencapaian tujuan yang dilakukan tepat sasaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan sasaran yang dituju tepat sasaran.

Sasaran atau target merujuk pada tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Sasaran ini bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai, yang memberikan arah dan fokus dalam segala upaya yang dilakukan. Dalam konteks organisasi atau individu, sasaran berfungsi sebagai panduan untuk mengukur kemajuan dan sebagai tolok ukur pencapaian yang diinginkan. Sasaran juga sering kali dikaitkan dengan perencanaan strategis, di mana sasaran yang ditetapkan harus realistis dan relevan dengan visi serta misi yang lebih besar. Dalam praktiknya, sasaran atau target tidak hanya bertujuan untuk memberikan arah, tetapi juga untuk memotivasi dan mendorong individu atau tim untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih efisien.

Sub indikator Sasaran atau target dalam penelitian ini akan melihat bagaimana sasaran atau target tepat sasaran atau tidak. Berikut wawancara penulis dengan Lurah Meranti Pandak terkait sasaran/target program kebersihan penanganan kawasan kumuh:

“program kebersihan dari pihak kelurahan tidak ada, yang ada itu dari pihak pemerintah kota. targetnya mengurangi dampak daripada kawasan kumuh, seperti menggali program-program di pemerintah kota seperti perbaikan infrastruktur kawasan kumuh melalui program DAK (dana alokasi khusus) tahun 2024. Untuk rumah layak huni di kelurahan ini ada 30 Unit yang dibangun dan telah selesai 5 unit, sanitasi atau septitank atau wc umum secara individual itu ada 50 unit”. **(Wawancara dengan Bapak Silvenus Hendra, SH selaku Lurah Meranti Pandak, 12 November 2024).**

Kurun waktu adalah rentang atau periode waktu tertentu yang digunakan untuk mengukur atau menentukan lamanya suatu aktivitas, proses, atau kejadian berlangsung. Dalam konteks yang lebih umum, kurun waktu merujuk pada jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Sub indikator Kurun waktu pada penelitian ini ingin melihat bagaimana kurun waktu untuk program penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Meranti Pandak. Berikut hasil wawancara penulis dengan Lurah Meranti Pandak:

“Untuk kurun waktu penanganan kawasan kumuh ini sepertinya tahun 2024 ini”. **(Wawancara dengan Bapak Silvenus Hendra, SH selaku Lurah Meranti Pandak, 12 November 2024).**

Integrasi, yaitu pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus (Musyawarah) dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Pada indikator ini, akan dilihat bagaimana pemerintah kelurahan melaksanakan sosialisasi, mengembangkan konsensus, serta berkomunikasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai

sejauh mana pemerintah kelurahan menjalin hubungan dengan masyarakat, untuk mengidentifikasi apakah terdapat integrasi yang efektif antara pemerintah kelurahan dan warga setempat.

Dalam konteks pemerintahan kelurahan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sosialisasi program kebersihan kepada warga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Melalui berbagai metode seperti sosialisasi langsung, penyuluhan, serta media informasi, pemerintah berupaya membentuk perilaku kolektif yang mendukung terciptanya kawasan permukiman yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Berikut Wawancara penulis dengan *Staff* Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terkait sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai program penanganan kawasan kumuh sebagai berikut:

“...sebelum pembangunan kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk rencananya. Kami mengadakan pertemuan warga dan pihak lainnya. metode sosialisasi efektif sekali, karena masyarakat kami undang langsung untuk melakukan pertemuan-pertemuan. dampaknya bagus, kami mendapatkan respon yang baik dari warga”. (Wawancara dengan Bapak Hadyan Maulana, S.PWK & Ibu Mairiza, ST selaku *Staff* Analisis Batas Wilayah & *Staff* Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan, 7 November 2024).

Pengembangan konsensus sering digunakan dalam pengambilan keputusan di organisasi, pemerintahan, dan komunitas sebagai pendekatan yang demokratis, serta berorientasi pada kepentingan bersama. Berikut hasil wawancara penulis dengan Ketua RW Kelurahan Meranti Pandak terkait pengembangan konsensus sebagai berikut:

“Pertemuan rutin ada di kelurahan, sebulan sekali membahas masalah bantuan, jalan dan lain-lain”. (Wawancara dengan Bapak Zeprizal Purba selaku Ketua RW 12 Kelurahan Meranti Pandak, 6 Desember 2024)

Dalam indikator pencapaian tujuan, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan secara efektif antara individu atau kelompok untuk memastikan pemahaman yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang baik dalam konteks ini mencakup kejelasan pesan, ketepatan dalam penyampaian, serta umpan balik yang memungkinkan evaluasi dan penyesuaian strategi guna mencapai hasil yang diharapkan. pemerintahan kelurahan beserta dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak RT/RW dan juga masyarakat. Bagaimana komunikasi pemerintahan kelurahan beserta dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada masyarakat kelurahan meranti pandak. Berikut hasil wawancara penulis

dengan *Staff* Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terkait komunikasi kepada masyarakat mengenai program penanganan kawasan kumuh sebagai berikut:

“baik-baik saja, komunikasi berjalan baik”. (**Wawancara dengan Bapak Hadyan Maulana, S.PWK & Ibu Mairiza, ST selaku Staff Analisis Batas Wilayah & Staff Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan, 7 November 2024**).

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan tenaga kerja dan pengisian tenaga kerja. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat mengetahui bagaimana dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman beserta pihak pemerintahan kelurahan melakukan tolak ukur pengadaan dan pengisian tenaga kerja untuk proses penanganan kawasan kumuh kelurahan meranti pandak.

Tolak ukur pengadaan tenaga kerja dalam indikator adaptasi adalah standar atau kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana tenaga kerja dalam suatu organisasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, budaya perusahaan, serta dinamika pasar tenaga kerja. Tolak ukur ini membantu perusahaan dalam memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut dan dikembangkan mampu bertahan serta berkembang dalam lingkungan kerja yang dinamis. Berikut hasil wawancara penulis dengan *staff* dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru terkait tolak ukur pengadaan tenaga kerja:

“Dilihat dari sertifikat keahlian Kerja (SKA), apakah mereka layak atau tidak, apakah mereka memenuhi syarat-syarat atau tidak”. (**Wawancara dengan Bapak Hadyan Maulana, S.PWK & Ibu Mairiza, ST selaku Staff Analisis Batas Wilayah & Staff Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan, 7 November 2024**).

Dalam konteks adaptasi, pengisian tenaga kerja tidak hanya berfokus pada pemenuhan jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada kesesuaian keterampilan, fleksibilitas, serta kemampuan pekerja dalam menghadapi perubahan. Berikut hasil wawancara penulis dengan *staff* dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman terkait pengisian tenaga kerja:

“...untuk tenaga kerja fisiknya menggunakan kontrak. Kami menggunakan sistem lelang nanti dapat pemenang misalnya perusahaan A, mereka yang menangani pembangunan ini”. (**Wawancara dengan Bapak Hadyan Maulana, S.PWK & Ibu Mairiza, ST selaku Staff Analisis Batas Wilayah & Staff Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan, 7 November 2024**).

Faktor Penghambat Pemerintahan Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Kumuh Kelurahan Meranti Pandak) Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan untuk kawasan kumuh kelurahan meranti pandak yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan menghadapi beberapa faktor penghambat sehingga program keberishan di kelurahan meranti pandak belum efektif dalam mengatasi kawasan kumuh tersebut.

Permasalahan sampah merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kawasan permukiman kumuh. Kawasan kumuh tidak hanya ditandai oleh kondisi bangunan yang tidak layak, tetapi juga mencakup permasalahan sanitasi, infrastruktur jalan, risiko banjir, dan berbagai aspek lingkungan lainnya. Hasil observasi menunjukkan beberapa permasalahan sampah di Kelurahan Meranti Pandak.

Di Kelurahan Meranti Pandak, permasalahan sampah masih menjadi perhatian utama bagi masyarakat setempat. Akumulasi sampah di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan tumpukan sampah yang dibiarkan selama 3–4 hari tanpa pengangkutan oleh pihak terkait. Kondisi ini menyebabkan gangguan kenyamanan lingkungan, terutama dalam aspek pencemaran udara akibat bau tidak sedap. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, sebagian warga berinisiatif untuk membuang sampah secara mandiri, termasuk dengan cara membakar sampah. Selain itu, terdapat kecenderungan warga untuk membuang sampah di satu titik tertentu yang kemudian diikuti oleh warga lainnya, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah di area tertentu.

Ketua RW Kelurahan Meranti Pandak menyampaikan bahwa permasalahan sampah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah maupun pihak terkait guna mengatasi dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan. Berikut hasil wawancara penulis dengan ketua RW Kelurahan Meranti Pandak:

“...Sebelumnya sampah masyarakat kita ada yang ambil dan masyarakat setuju cuman terkadang dari pemerintah kelurahan kurang memperhatikan”. (**Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku Ketua RW 5 Kelurahan Meranti Pandak, 20 November 2024**)

Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan memiliki peran krusial dalam pengelolaan permasalahan lingkungan. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi cenderung lebih responsif terhadap faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, seperti pencemaran dan penurunan kualitas kebersihan. Dalam konteks ini, Lurah Meranti Pandak menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Mereka lebih mendahulukan kepentingan ekonominya daripada menjaga lingkungan. Karena ekonomi itu adalah sumber kehidupan mereka. Kadang mereka bekerja sampai malam. Jika ada gotong royong paling cuman 1-2 orang saja yang hadir di hari minggu. Terkadang di hari minggu mereka tetap pergi bekerja. Faktor ekonomi itu menentukan berhasil atau tidaknya kebersihan lingkungan. Disini kehidupan masyarakat biasa seperti buruh angkut, PNS/Polri tidak banyak disini dan karyawan swasta. Yang paling banyak itu buruh harian, buruh lepas, nelayan. Tidak ada mereka terfikir untuk membersihkan rumah”. **(Wawancara dengan Bapak Silvenus Hendra, SH selaku Lurah Meranti Pandak, 12 November 2024)**

Penanganan kawasan kumuh ini tentunya mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat. Anggaran sudah disediakan dan ditetapkan nominal nya oleh pemerintah untuk menurunkan bantuan apa saja yang akan diturunkan ke Kelurahan Meranti Pandak. Anggaran untuk program penanganan kawasan kumuh adalah alokasi dana yang disusun dan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas permukiman di kawasan kumuh. Anggaran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Anggaran untuk penanganan kawasan kumuh telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, tidak semua aspek dapat diperbaiki secara bersamaan. Oleh karena itu, pembenahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan ketersediaan sumber daya. Berikut hasil wawancara penulis dengan Lurah Meranti Pandak:

“Kendala tidak ada, hanya saja soal uang. Jika ada uang semua nya kita bereskan”. **(Wawancara dengan Bapak Silvenus Hendra, SH selaku Lurah Meranti Pandak, 12 November 2024)**

Program bantuan untuk kawasan kumuh merupakan program yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman. Kelurahan Meranti Pandak telah menerima berbagai jenis program bantuan untuk penanganan kawasan kumuh. Namun, berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan sejumlah masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Meskipun nama-nama penerima telah diusulkan oleh RT/RW setempat kepada pihak kelurahan, bantuan program penanganan kawasan kumuh belum sepenuhnya tersalurkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Ketua RT Kelurahan Meranti Pandak:

“...Sudah 2 tahun ini bantuan rumah layak huni belum ada titik terang nya. Survey nya udah 6 kali dalam setahun tapi tidak ada juga. Terus untuk perbaikan jalan dan sanitasi mereka sudah melakukan survey sebanyak 4 kali dalam setahun tapi tidak pernah

teralisasi. Infrastruktur jalan disini gak layak terjadinya penyempitan jalan, IPAL kami tidak punya, drainase tidak berjalan, PAMSIMAS tidak ada, septitank tahun 2022 terakhir itu cuman beberapa rumah". (Wawancara dengan ibu Megawati Dasril selaku Ketua RT 02 Kelurahan Meranti Pandak, 5 Desember 2024)

Kualitas bangunan tidak jangka panjang dalam penanganan program kawasan kumuh merujuk pada kondisi bangunan yang dibangun atau diperbaiki dengan standar konstruksi rendah, material yang kurang tahan lama, serta desain yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam konteks program penanganan kawasan kumuh, kualitas bangunan yang tidak berorientasi pada jangka panjang dapat menghambat efektivitas program, menyebabkan permasalahan berulang, serta meningkatkan kebutuhan rehabilitasi atau perbaikan di masa mendatang. Berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kelurahan Meranti Pandak yang menerima bantuan:

"...Contoh nya seperti rumah saya ini gagang pintu di berikan yang sangat murah dan sekarang sudah patah, pintu juga seperti itu. Tapi ya bagaimana lagi". (Wawancara dengan Ibu Yulianti selaku Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak, 6 Desember 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas Pemerintahan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Kumuh Kelurahan Meranti Pandak) Kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif. Pemerintahan kelurahan sudah sangat proaktif terhadap lingkungan disekitarnya dan cepat tanggap dalam mengatasi kawasan kumuh ini namun, dilihat dari indikator pencapaian tujuan yaitu sasaran atau target di ketahui bahwa sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tahun 2024 adalah menjadikan Kelurahan Meranti Pandak sebagai kampung tradisional Pandak. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah perubahan Kelurahan Meranti Pandak menjadi kawasan yang bersih, dengan fokus pembangunan yang meliputi perumahan layak huni, perbaikan infrastruktur jalan, serta peningkatan sistem drainase untuk mengantisipasi banjir. Pada kenyataannya, sasaran program kebersihan di kawasan kumuh ini belum sepenuhnya tepat sasaran dan merata di kalangan seluruh warga yang berhak menerimanya dan juga tidak ada perubahan yang signifikan dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Dilihat dari *integrasi* yaitu sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi berjalan baik antara pemerintahan kelurahan, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman beserta Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak. Sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi diadakan jika memang diperlukan saja. Dilihat dari

Adaptasi yaitu pengadaan dan pengisian tenaga kerja untuk penanganan kawasan kumuh pemerintah kelurahan dan dinas perumahan rakyat & kawasan permukiman selain melibatkan tenaga kerja kontrak mereka juga melibatkan masyarakat setempat untuk pemberdayaan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat Kelurahan Meranti Pandak. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas Pemerintahan Kelurahan dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan (studi kasus kawasan kumuh Kelurahan Meranti Pandak) Kota Pekanbaru yaitu permasalahan sampah yang belum terselesaikan, kurangnya kesadaran masyarakat, anggaran yang terbatas, program bantuan tidak tepat sasaran dan kualitas bangunan tidak jangka panjang.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan Meranti Pandak perlu melakukan evaluasi dan pemetaan ulang terhadap sasaran program kebersihan agar lebih tepat guna dan merata bagi seluruh warga yang berhak menerimanya. Pendekatan berbasis data, seperti survei kondisi lingkungan dan pendataan warga yang membutuhkan bantuan, dapat meningkatkan efektivitas distribusi program. Meskipun komunikasi dan sosialisasi telah berjalan dengan baik, pemerintah kelurahan disarankan untuk meningkatkan intensitasnya dengan jadwal yang lebih rutin. Melalui diskusi kelompok terarah dan musyawarah warga, partisipasi masyarakat dapat lebih maksimal dalam mendukung kebijakan kebersihan dan perbaikan lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru perlu meningkatkan pemerataan dan ketepatan sasaran program kebersihan dan penataan kawasan kumuh. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengelolaan Sampah, Pemerintah kelurahan dapat mengadakan edukasi lingkungan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, T. D. (2025). *Metode lattice sebagai strategi efektif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Dasar, 10(2), 145–153.
- Bakri, B., Intiyati, A., & Widartika. (2018). *Sistem penyelenggaraan makanan institusi*. Bahan Ajar Gizi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ferdiansyah, B. (2022). *Efektivitas pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe* (Disertasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Fitrisia, Y., & Fadhli, M. (2022). Evaluasi effectiveness dan satisfaction quality in use model pada aplikasi bank sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. *Jurnal Komputer Terapan*, 8(1), 67–83.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, A., Bedasari, H., & Ikhsan, M. (2023). Evaluasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program kota tanpa kumuh di kawasan kota lama Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 4(1), 43–49.
- Hadi, A., Bedasari, H., & Zebua, B. H. (2025, Februari). Policy network in improving the quality of Meranti slum area effort to realize sustainable cities and settlements in Pekanbaru. Dalam *1st International Conference on Social Environment Diversity (ICOSEND 2024)* (hlm. 903–912). Atlantis Press.
- Julianto, B., & Carnarez, T. Y. A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi profesional: Kepemimpinan, komunikasi efektif, kinerja, dan efektivitas organisasi (suatu kajian studi literature review ilmu manajemen terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691.
- Jumarsa, J., Rizal, M., & Jailani, J. (2020). Korelasi antara pengetahuan lingkungan dengan sikap masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Gampong Cot Siren Samalanga Kabupaten Bireuen. *Jurnal Biology Education*, 8(2).
- Kadir, A. (2019). *Pengantar teknologi pangan*. Jakarta: Andi.
- Kansil. (2008). *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, D., Pramudita, M. E., & Fathia, N. R. (2017). Buah klimaterik dan non-klimaterik. *Jurnal Hortikultura*, 28(2), 145–153.
- Luahambowo, S., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah kelurahan dalam program pemberdayaan kebersihan lingkungan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 9–19.
- Misgiyarta. (2008). *Higiene sanitasi pangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugraha, D. (2018). *Manajemen operasional hotel*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74.
- Prabowo, A. (2019). *Analisis penerapan prinsip FIFO pada penyimpanan bahan pangan di hotel berbintang*. Universitas Indonesia.
- Pramono, J., Triastuti, N., & Haryanto, A. T. (2023). Efektivitas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) tahun 2021 di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. *Jl@P*, 12(2).

- Prastowo. (2017). Kualitas makanan pada Hotel Neo Kupang. *Jurnal Pariwisata*, 3(1), 52–61.
- Pratiwi, A., Riyadi, S., & Nugroho, A. H. (2020). Pengaruh sortasi bahan terhadap kualitas produk olahan sayur di industri rumah tangga. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 8(3), 123–132.
- PRIEDS. (2023). Loading dock dalam manajemen gudang: Pengertian, fungsi dan tipsnya. Diakses dari <https://www.prieds.com/post/loading-dock-dalam-manajemen-gudang-pengertian-fungsi-dan-tipsnya>
- Putri, N. Q. (2020). Efektivitas penggunaan aplikasi Qraved sebagai media memilih tempat makan. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(1), 22–32.
- Rahmawati, F. (2019). Pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan tamu hotel. *Jurnal Hospitality Indonesia*, 8(1), 45–52.
- Risnawati, R., & Handayani, S. R. (2021). Peduli lingkungan: Kampanye dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan Kelurahan Malasom. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 57–62.
- Safrizal, S., Safuridar, S., & Fuad, M. (2021). Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (Studi kasus pada wilayah Kota Langsa). *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 200–213.
- Saputra, D., & Sujianto, S. (2022). Efektivitas program pembayaran pajak elektronik (e-Billing) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 147–155.
- Sarkawi. (2022). *Hukum pemerintahan desa dan kelurahan*. Mataram: Mataram University Press.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi: Suatu pendekatan perilaku*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto, S. (2021). Efektivitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 227–239.
- Sujianto. (2010). *Kelembagaan lokal: Konsep dan realitas*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.